

Dampak Peningkatan Upah Minimum Provinsi Terhadap Inflasi Dan Pasar Kerja Di Provinsi Aceh

Safrida*, Sofyan*, Nura Syahriani**

ABSTRACT

This research was conducted in the Province of Aceh. The purpose of this study was to analyze the factors that affect inflation, the provincial minimum wage, labor supply and labor demand in the Province during the period from 1998 to 2012. The data used in this study is secondary data time series obtained from the Central Statistics Agency of Aceh, Department of Labor and Population Mobility Aceh, Department of Trade and Industry Aceh and Aceh Pertamina. The model used is the model of simultaneous equations by the method of 2SLS (Two Stage Least Square) is used to analyze the function of each equation in this study. The results showed that the provincial minimum wage impact on inflation and the increase in labor supply and the impact on the demand for labor in the province. Economically, the regression results indicate that for each of the variables that affect inflation, the provincial minimum wage, labor supply and demand in the province of Aceh has not been all in accordance with the sign the expected coefficients and variables in each equation only population significant effect on labor supply, whereas the other variables did not significantly affect the endogenous variables. However, simultaneous testing for functionality inflation equation has no real effect, whereas the function of the provincial minimum wage equations, labor supply and labor demand in the province has a real impact.

Keywords: *Inflation, Minimum Wage Province, Offers Labor, Labor Demand.*

PENDAHULUAN

Secara umum upah mempunyai kedudukan strategis. Bagi pekerja, upah diperlukan untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya, serta sebagai motivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Bagi perusahaan, upah merupakan komponen biaya produksi yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Sedangkan upah bagi pemerintah, merupakan sarana pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan (Djojohadikusumo, 1993). Tujuan dari penetapan upah minimum

adalah untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berada di bawah upah minimum dan melindungi pekerja/buruh dari tindakan pengusaha yang memberi upah tidak layak kepada pekerjanya.

Salah satu komponen penetapan upah minimum adalah laju inflasi di provinsi masing-masing. Menurut (Soekirno, 1999), inflasi merupakan salah satu dari masalah penting dalam suatu perekonomian, dimana masalah ini semakin memburuk jika tidak dapat dikendalikan dengan baik.

* Staf Pengajar Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

** Sarjana Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Pada satu sisi inflasi dapat disebabkan oleh kurangnya produksi dan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap suatu barang. Sementara itu pada sisi lain, inflasi dapat juga disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi dalam suatu perusahaan, yang akan mengakibatkan meningkatnya harga hasil produksi.

Tingginya laju inflasi mendorong pekerja menuntut untuk terjadinya peningkatan upah minimum provinsi. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Permasalahan tersebut adalah semakin menyempitnya kesempatan kerja akibat meningkatnya upah minimum provinsi sebagai salah satu komponen dari biaya produksi perusahaan.

Kondisi ini juga terjadi di Indonesia. Ditambah lagi dari tahun-tahun jumlah penduduk di negara ini semakin meningkat dengan cepat yang mengakibatkan jumlah angkatan kerja pun semakin meningkat. Akibatnya terjadi peningkatan persaingan kesempatan kerja. Kondisi ini apabila tidak ditanggulangi maka akan menambah jumlah pengangguran (Tjiptoherijanto, 1996).

Melihat kondisi tersebut, dimana kebijakan peningkatan upah minimum mempunyai dampak yang saling bertolak belakang antara masing-masing pelaku ekonomi. Pada satu sisi peningkatan upah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup pekerja, tetapi disisi lain peningkatan taraf hidup akan meningkatkan daya beli masyarakat yang akhirnya mengakibatkan peningkatan permintaan barang dan jasa yang berakibat pada peningkatan laju inflasi. Sementara pada sisi yang lain, peningkatan upah minimum juga akan

mengakibatkan penurunan kesempatan kerja dan peningkatan jumlah angkatan kerja. Kondisi ini akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Dengan demikian diperlukan suatu analisis tentang dampak peningkatan upah minimum provinsi terhadap inflasi di Provinsi Aceh, dan dampak peningkatan upah minimum provinsi terhadap pasar kerja (permintaan dan penawaran tenaga kerja) di Provinsi Aceh.

METODELOGI PENELITIAN

Lokasi, Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh. Objek penelitian berfokus pada upah minimum provinsi, inflasi dan pasar kerja di Provinsi Aceh. Ruang lingkup penelitian ditinjau dari sisi peningkatan upah minimum provinsi terhadap inflasi dan pasar kerja di Provinsi Aceh.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis data sekunder (*time series*) dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2012. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk Provinsi Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Pertamina Aceh serta dari berbagai sumber dan literatur lainnya.

Metode Analisis data

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model regresi **dalam** bentuk persamaan simultan, dengan menggunakan metode 2SLS (*Two Stage Least Square*). Adapun model analisis regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. $INF = a + a_1 UMP + a_2 HBBM + e$
2. $UM = b + b_1 STK + b_2 DTK + b_3 INF + e$

3. $STK = c + c_1 UMP + c_2 JP + c_3 U + e$
 4. $DTK = d + d_1 UMP + d_2 JI + d_3 I + e$

Keterangan :

- a = Konstanta
 INF = Inflasi (Persen/Tahun)
 UMP = Upah minimum provinsi (Rp/Tahun)
 HBBM = Harga bahan bakar minyak (Rp/Liter)
 STK = Penawaran Tenaga Kerja (Jiwa/Tahun)
 DTK = Permintaan Tenaga Kerja (Jiwa/Tahun)
 JP = Jumlah penduduk (Jiwa/Tahun)
 U = Pengangguran (Jiwa/Tahun)
 JI = Jumlah Industri (Unit/Tahun)
 I = Investasi (Milyar/Tahun)
 e = error

Nilai koefisien yang diharapkan

- (hipotesis): $a_1, a_2 > 0$
 $: b_1 < 0, b_2, b_3 > 0$
 $: c_1, c_2, c_3 > 0$
 $: d_1 < 0, d_2, d_3 > 0$

Pengujian

Untuk melihat pengaruh secara serempak variabel penjelas terhadap variabel endogen digunakan uji “F”, sedangkan untuk melihat pengaruh secara parsial digunakan uji “t”

Untuk mengetahui besarnya variasi variabel penjelas mampu menjelaskan variabel endogen, digunakan koefisien determinasi (R^2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Inflasi (INF) di Provinsi Aceh dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.

Inflasi di Provinsi Aceh dipengaruhi oleh upah minimum provinsi (UMP) dan harga bahan bakar

minyak (HBBM), secara rinci perkembangannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa perkembangan inflasi di Provinsi Aceh periode 1998-2012 setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Kondisi ini terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor yang salah satunya yaitu terjadinya kenaikan upah minimum yang menyebabkan peningkatan konsumsi masyarakat.

Inflasi juga sangat dipengaruhi oleh harga bahan bakar minyak. Apabila kita melihat beberapa periode yang lalu, kebijakan meningkatkan harga bahan bakar minyak oleh pemerintah bukanlah merupakan hal yang baru. Berdasarkan data dapat dilihat, kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak sudah diberlakukan pada masa kepe-mimpinan Soekarno yang sedikitnya sudah terjadi 12 kali kenaikan harga bahan bakar minyak (Anonymous, 2013).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ekonomi semua variabel penjelas yang mempengaruhi inflasi (INF) yang dinilai dari tanda (sign) dan besaran (size) sudah sesuai dengan hipotesis. Namun secara statistik yang dilihat dari R^2 , Fhitung, dan Thitung terlihat bahwa untuk hasil pengujian koefisien determinasi (R^2), diperoleh nilai sebesar 0,424. Angka ini diubah ke dalam bentuk persen yang artinya bahwa keeratan hubungan antara variabel penjelas dengan variabel endogen inflasi (INF) di Provinsi Aceh selama 15 tahun terakhir sebesar 42,4 persen yang dapat dijelaskan oleh dua variabel penjelas di dalam fungsi persamaan, sedangkan selisihnya sebesar 57,6 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar dari fungsi persamaan ini.

Tabel 1. Perkembangan Inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan Harga Bahan Bakar Minyak di Provinsi Aceh Tahun 1998-2012.

Tahun	Inflasi (%)	UMP (Rupiah)	HBBM (Rupiah)
1998	79,34	243.821,52	928,84
1999	6,09	227.423,86	811,27
2000	9,65	336.807,32	889,68
2001	14,14	338.409,47	1.037,78
2002	10,57	330.000,00	1.100,00
2003	4,02	396.788,34	1.372,42
2004	7,17	467.250,02	1.189,36
2005	29,34	471.017,24	2.203,14
2006	9,98	540.326,83	2.281,94
2007	9,41	516.434,77	2.187,25
2008	11,92	579.508,57	2.607,78
2009	3,72	664.672,64	2.104,79
2010	5,92	701.148,81	2.319,18
2011	3,44	700.716,28	3.010,48
2012	2,55	714.504,44	3.215,27
r (%)	-20,5	7,4	8,6

Sumber: BPS (2012) dan BI (2012).

Hasil pengujian secara serempak (uji-F) antara variabel endogen dengan variabel penjelas diperoleh nilai $F_{cari} = 6,734$ dari koefisien alfa yang ada ($\alpha = 0,218$) lebih besar dari alfa pada tingkat kepercayaan 90 persen ($\alpha = 0,10$), artinya upah minimum provinsi (UMP) dan harga bahan bakar minyak (HBBM) tidak berpengaruh secara nyata (non significant) terhadap inflasi (INF) di Provinsi Aceh.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi (INF) di Provinsi Aceh.

Persamaan 1	Unstandardized Coefficients	t_{cari}	Sig.
	B		
Constant	42,657	2,665	0,021
UMP	0,022	1,194	0,255
HBBM	0,015	0,739	0,474
$F_{cari} = 6,734$			
Sig. = 0,218			
$R^2 = 0,424$			

Sumber: Data Diolah (2014).

Berdasarkan Tabel 2 dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$INF = 42,657 + 0,022 UMP + 0,015 HBBM$$

Persamaan ini memperlihatkan nilai konstanta pada persamaan inflasi di Provinsi Aceh sebesar 42,657. Hal ini menjelaskan apabila upah minimum

provinsi dan harga bahan bakar minyak pada tahun tertentu dianggap konstan, maka akan meningkatkan inflasi di Provinsi Aceh sebesar 42,657 persen/tahun. Kondisi ini menunjukkan ada faktor lain selain upah dan harga BBM yang mendorong meningkatnya laju inflasi di Provinsi Aceh.

a. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Nilai koefisien upah minimum provinsi sebesar 0,022. Ini artinya setiap terjadi peningkatan upah minimum provinsi sebesar satu rupiah, maka akan meningkatkan inflasi di Provinsi Aceh sebesar 0,022 persen. Dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.

Berdasarkan uji-t statistik diperoleh nilai $t_{cari} = 1,194$. Berdasarkan nilai signifikansinya, terlihat bahwa upah minimum provinsi (UMP) tidak berpengaruh secara nyata (non significant) terhadap inflasi (INF) di Provinsi Aceh.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa kenaikan upah minimum provinsi pasti akan berpengaruh terhadap peningkatan laju inflasi. Peningkatan inflasi akibat peningkatan upah terjadi karena perusahaan melakukan efisiensi, dengan salah satu opsinya adalah menaikkan harga produk, baik barang maupun jasa.

b. Harga Bahan Bakar Minyak (HBBM)

Nilai koefisien harga bahan bakar minyak (HBBM) sebesar 0,015. Ini artinya setiap terjadi peningkatan harga bahan bakar minyak sebanyak 1 rupiah saja maka akan meningkatkan inflasi di Provinsi Aceh sebesar 0,015 persen. Dengan asumsi bahwa variabel lain tidak berubah (konstan).

Darmin Nasution mengatakan, Kenaikan harga BBM tidak dapat dihindari. Kenaikan ini biasanya terjadi karena penghapusan subsidi bahan bakar minyak. Selain itu meningkatnya harga bahan bakar minyak diakibatkan juga oleh beberapa hal lain, salah satunya yaitu meningkatnya harga minyak dunia yang membuat pemerintah tidak dapat menjual BBM kepada masyarakat dengan harga yang sama dengan harga sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan

bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak akan memicu inflasi terutama pada bulan-bulan saat kenaikan itu dilaksanakan (Anonymous, 2013).

Namun dari uji-t diperoleh nilai $t_{cari} = 0,739$ dengan nilai signifikansinya 0,474 lebih besar dari alfa pada tingkat kepercayaan 90 persen ($\alpha = 0,10$) yang artinya harga bahan bakar minyak (HBBM) tidak berpengaruh secara nyata (non significant) terhadap inflasi (INF) di Provinsi Aceh.

2. Pasar Kerja di Provinsi Aceh dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.

a. Persamaan Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah merupakan imbalan dari sebuah pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk uang. Dalam penelitian ini, upah minimum provinsi hanya dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu permintaan tenaga kerja (STK), penawaran tenaga kerja (DTK) dan inflasi (INF), (Tabel 3).

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah penawaran tenaga kerja Provinsi Aceh meningkat dari tahun ke tahun, begitu pula dengan jumlah permintaan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Aceh yang kian pesat serta kebutuhan akan barang dan jasa yang meningkat pula. Namun pada tahun 2004 permintaan dan penawaran tenaga kerja terjadi penurunan. Ini diakibatkan karena pada tahun tersebut adanya bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi Aceh yang menyebabkan miskinnya pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari segi upah minimum provinsi yang setiap tahunnya naik, upah tertinggi terdapat pada tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 714504,44,-.

Upah yang terus meningkat ini bisa terjadi karena inflasi yang terus terjadi setiap tahunnya.

Tabel 3. Perkembangan UMP, Penawaran Tenaga Kerja, Permintaan Tenaga Kerja dan Inflasi di Provinsi Aceh Tahun 1998-2012

Tahun	UMP (Rupiah)	STK (Jiwa)	DTK (Jiwa)	Inflasi (%)
1998	243.821,52	1.631.300	1.422.915	79,34
1999	227.423,86	1.680.400	1.360.159	6,09
2000	336.807,32	1.631.300	1.342.131	9,65
2001	338.409,47	1.717.800	1.528.631	14,14
2002	330.000,00	1.828.000	1.678.348	10,57
2003	396.788,34	2.201.900	1.917.866	4,02
2004	467.250,02	1.418.973	1.262.013	7,17
2005	471.017,24	1.554.461	1.334.220	29,34
2006	540.326,83	1.649.850	1.460.681	9,98
2007	516.434,77	1.742.185	1.570.761	9,41
2008	579.508,57	1.793.410	1.621.998	11,92
2009	664.672,64	1.897.922	1.732.561	3,72
2010	701.148,81	1.938.519	1.776.254	5,92
2011	700.716,28	2.001.259	1.852.473	3,44
2012	714.504,44	2.106.580	1.960.698	2,55
r (%)	7,4	1,7	2,1	-20,5

Sumber: BPS Aceh (2013)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ekonomi semua variabel penjelas yang mempengaruhi upah minimum provinsi (UMP) yang dinilai dari tanda (sign) dan besaran (size) sudah sesuai dengan hipotesis. Namun secara statistik yang dilihat dari R², Fhitung, dan Thitung terlihat bahwa untuk hasil pengujian koefisien determinasi (R²), diperoleh nilai sebesar 0,422. Angka ini diubah ke dalam bentuk persen yang artinya bahwa keeratan hubungan antara variabel penjelas dengan variabel endogen upah minimum provinsi (UMP) di Provinsi Aceh selama 15 tahun terakhir sebesar 42,2 persen yang dapat dijelaskan oleh tiga variabel

penjelas di dalam fungsi persamaan ini, sedangkan selisihnya sebesar 57,8 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar dari fungsi persamaan ini.

Hasil pengujian secara serempak (uji-F) antara variabel endogen dengan variabel penjelas diperoleh nilai Fcari = 2,674 dari koefisien alfa yang ada ($\alpha = 0,099$) lebih kecil dari alfa pada tingkat kepercayaan 90 persen ($\alpha = 0,10$) artinya penawaran tenaga kerja (STK), permintaan tenaga kerja (DTK) dan inflasi (INF) berpengaruh secara nyata (significant) terhadap upah minimum provinsi (UMP) di Provinsi Aceh. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada hasil regresi Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Aceh

Persamaan 1	Unstandardized Coefficients	t_{cari}	Sig.
	B		
Constant	- 771532,473	- 1,198	0,256
STK	- 0,057	- 0,026	0,980
DTK	0,855	0,371	0,718
INF	1202,151	0,256	0,803
$F_{\text{cari}} = 2,674$			
Sig. = 0,099			
$R^2 = 0,422$			

Sumber: Data Diolah (2014).

Berdasarkan Tabel 4 dapat diturunkan persamaan sebagai berikut:

$$\text{UMP} = -771532,473 - 0,057 \text{ STK} + 0,855 \text{ DTK} + 1202,151 \text{ INF}$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa nilai konstanta pada persamaan upah minimum provinsi di Provinsi Aceh sebesar -771.532,473. Ini artinya apabila penawaran tenaga kerja, permintaan tenaga kerja dan inflasi pada tahun tertentu dianggap konstan, maka akan menurunkan upah minimum provinsi di Provinsi Aceh sebesar 771.532,471 rupiah pertahun.

a. Penawaran Tenaga Kerja (STK)

Nilai koefisien penawaran tenaga kerja (STK) adalah sebesar - 0,057. Ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan penawaran tenaga kerja 1 jiwa saja akan menurunkan upah minimum provinsi sebesar 0,057 rupiah dengan asumsi bahwa variabel lain di anggap konstan (tidak berubah).

Dari hasil analisis secara statistik diperoleh nilai $t_{\text{cari}} = - 0,026$ sedangkan dengan nilai signifikansinya 0,980 lebih besar dari nilai alfa pada tingkat kepercayaan 90 persen ($\alpha = 0,10$). Kondisi ini menunjukkan penawaran tenaga kerja (STK) tidak berpengaruh secara nyata (*non significant*) terhadap upah minimum provinsi di Provinsi Aceh. Ini berarti

tingginya penawaran tenaga kerja bukanlah faktor utama yang mendorong peningkatan upah minimum di Provinsi Aceh.

b. Permintaan Tenaga Kerja (DTK)

Nilai koefisien permintaan tenaga kerja (DTK) yaitu sebesar 0,855. Ini menunjukkan setiap terjadi peningkatan permintaan tenaga kerja sebanyak 1 jiwa saja maka akan meningkatkan upah minimum provinsi sebesar 0,855 rupiah dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tidak berubah (konstan).

Dari hasil analisis secara statistik diperoleh nilai $t_{\text{cari}} = 0,371$ dan nilai signifikansinya = 0,718, lebih besar dari alfa pada tingkat kepercayaan 90 persen ($\alpha = 0,10$) artinya permintaan tenaga kerja (DTK) tidak berpengaruh secara nyata (*non significant*) terhadap upah minimum provinsi di Provinsi Aceh. Ini artinya apabila terjadi kenaikan upah, maka berpotensi untuk menurunkan permintaan tenaga kerja di Provinsi Aceh, terutama tenaga kerja yang produktivitasnya rendah. Namun peningkatan permintaan tenaga kerja tidak terlalu mempengaruhi perubahan upah.

c. Inflasi (INF)

Nilai koefisien inflasi (INF) adalah sebesar 1.202,151. Ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan inflasi 1 persen saja akan meningkatkan upah minimum provinsi sebesar 1.202,151 rupiah dengan asumsi bahwa variabel lain di anggap konstan (tidak berubah).

Kenaikan upah harus sesuai dengan inflasi, agar perusahaan atau pemerintah bisa menentukan upah sesuai dengan konsumsi dan kebutuhan hidup layak tenaga kerja sehingga dapat mensejahterakan keluarga pekerja pula.

Dari hasil analisis secara statistik diperoleh nilai $t_{\text{cari}} = 0,256$. Berdasarkan Table 4 dapat dilihat juga nilai signifikansinya sebesar 0,803

lebih besar dari alfa pada tingkat kepercayaan 90 persen ($\alpha = 0,10$). Kondisi ini menunjukkan inflasi (INF) tidak berpengaruh nyata (*non significant*) terhadap upah minimum provinsi di Provinsi Aceh.

2. Persamaan Penawaran Tenaga Kerja (STK)

Penawaran tenaga kerja dalam penelitian ini membahas pengaruh upah minimum provinsi (UMP), jumlah penduduk (JP) dan pengangguran (U) terhadap penawaran tenaga kerja (STK). Tabel 5 berikut memperlihatkan perkembangan masing-masing variabel tersebut.

Tabel 5. Perkembangan Penawaran Tenaga Kerja, Upah Minimum Provinsi, Jumlah Penduduk dan Pengangguran di Provinsi Aceh Tahun 1998-2012.

Tahun	STK (Jiwa)	Upah Minimum Provinsi (Rupiah)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	U (Jiwa)
1998	1.631.300	243.821,52	4.074.900	208.385
1999	1.680.400	227.423,86	4.110.100	320.241
2000	1.631.300	336.807,32	4.073.000	289.169
2001	1.717.800	338.409,47	4.142.100	189.169
2002	1.828.000	330.000,00	4.166.200	149.652
2003	2.201.900	396.788,34	4.218.500	284.034
2004	1.418.973	467.250,02	4.075.500	156.960
2005	1.554.461	471.017,24	4.031.600	220.241
2006	1.649.850	540.326,83	4.153.600	189.169
2007	1.742.185	516.434,77	4.223.800	171.424
2008	1.793.410	579.508,57	4.293.900	171.412
2009	1.897.922	664.672,64	4.363.500	165.361
2010	1.938.519	701.148,81	4.494.400	162.265
2011	2.001.259	700.716,28	4.597.300	148.786
2012	2.106.580	714.504,44	4.654.300	145.882
r (%)	1,7	7,4	0,8	-2,3

Sumber: Data Diolah (2014).

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, akan diikuti dengan peningkatan jumlah penawaran tenaga kerja di Provinsi Aceh. Penurunan penawaran tenaga kerja dan jumlah penduduk terjadi pada tahun 2004 yang dikarenakan Provinsi Aceh terjadi gempa bumi dan tsunami yang menewaskan banyak penduduk. Sementara pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 1999 sebanyak 320.241 jiwa. Pengangguran saat ini disebabkan karena Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga investasi menurun dan jumlah permintaan tenaga kerja juga berkurang, kondisi ini juga berlaku di Aceh.

Hasil analisis regresi (Tabel 6), menunjukkan bahwa secara ekonomi semua variabel penjelas yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja (STK) yang dinilai dari tanda (sign) dan besaran (size) sudah sesuai dengan hipotesis. Namun secara statistik yang

dilihat dari R^2 , Fhitung, dan thitung terlihat bahwa untuk hasil pengujian koefisien determinasi (R^2), diperoleh nilai sebesar 0,690, yang artinya adalah keeratan hubungan antara variabel penjelas dengan variabel endogen (STK) di Provinsi Aceh selama 15 tahun terakhir sebesar 69 persen yang dapat dijelaskan oleh tiga variabel penjelas didalam fungsi persamaan ini, sedangkan selisihnya sebesar 31 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar dari fungsi persamaan ini.

Hasil pengujian secara serempak (uji-F) antara variabel endogen dengan variabel penjelas diperoleh nilai $F_{cari} = 8,178$ dengan nilai signifikansinya = 0,004) lebih kecil dari nilai alfa pada tingkat kepercayaan 90 persen ($\alpha = 0,10$) artinya upah minimum provinsi (UMP), jumlah penduduk (JP) dan pengangguran (U) berpengaruh secara nyata (significant) terhadap penawaran tenaga kerja (STK) di Provinsi Aceh. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada hasil analisis regresi berikut.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi 2SLS Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penawaran Tenaga Kerja (STK) di Provinsi Aceh

Persamaan 1	Unstandardized Coefficients	t_{cari}	Sig.
	B		
Constant	- 2,941E6	- 1,911	0,082
UMP	0,002	0,003	0,997
JP	1,056	2,484	0,030
U	0,618	0,611	0,554
$F_{cari} = 8,178$			
Sig. = 0,004			
$R^2 = 0,690$			

Dari Tabel 6 maka dapat diambil persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{STK} = - 2,941\text{E}6 + 0,002 \text{ UMP} + 1,056 \text{ JP} + 0,618 \text{ U}$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa nilai konstanta pada persamaan penawaran tenaga kerja di Provinsi Aceh sebesar -2,941E6. Kondisi ini berarti apabila upah minimum provinsi, jumlah penduduk dan pengangguran (unemployment) pada tahun tertentu dianggap konstan, maka akan menurunkan penawaran tenaga kerja di Provinsi Aceh sebesar 2.941.600 jiwa pertahun.

Jika ditinjau dari hasil pengujian secara parsial, antara variabel endogen penawaran tenaga kerja dan variabel penjelas upah minimum provinsi, jumlah penduduk dan pengangguran (unemployment) dengan tingkat kepercayaan 90 persen ($\alpha = 10$) diperoleh hasil sebagai berikut.

a. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Nilai koefisien upah minimum provinsi (UMP) adalah sebesar 0,002. Ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan upah minimum provinsi 1000 rupiah saja akan meningkatkan jumlah penawaran tenaga kerja sebesar 2 jiwa dengan asumsi bahwa variabel lain di anggap konstan (tidak berubah).

Dari hasil analisis statistik secara parsial diperoleh nilai $t_{\text{cari}} = 0,003$ dengan nilai signifikansinya = 0,997 lebih besar dari alfa pada tingkat kepercayaan 90 persen artinya upah minimum provinsi (UMP) tidak berpengaruh secara nyata (non significant) terhadap penawaran tenaga kerja (STK) di Provinsi Aceh.

Safrida (2008) dengan disertasinya menyatakan bahwa upah tidak berpengaruh nyata terhadap penawaran tenaga kerja di Pulau Jawa, kondisi ini menunjukkan upah

bukan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya jumlah penawaran tenaga kerja di Jawa karena tenaga kerja di pulau ini bersedia bekerja pada berapa pun tingkat upah yang tersedia yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi penawaran tenaga kerja di Aceh.

b. Jumlah Penduduk (JP)

Nilai koefisien jumlah penduduk (JP) adalah sebesar 1,056, Ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan jumlah penduduk 1 jiwa, maka akan meningkatkan jumlah penawaran tenaga kerja (STK) sebesar 1 jiwa angkatan kerja, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (konstan).

Dari hasil analisis statistik secara parsial diperoleh nilai $t_{\text{cari}} = 2,484$ dengan nilai signifikansinya = 0,030 lebih kecil dari alfa pada tingkat kepercayaan 90 persen artinya jumlah penduduk (JP) berpengaruh nyata (significant) terhadap penawaran tenaga kerja (STK) di Provinsi Aceh.

c. Pengangguran (U)

Nilai koefisien pengangguran (U) adalah sebesar 0,618,. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan pengangguran sebanyak 1 jiwa saja maka akan meningkatkan jumlah penawaran tenaga kerja sebesar 0,618 jiwa, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (konstan).

Menurut Septiani (2010), tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator kondisi perekonomian di suatu negara. Dalam kondisi perekonomian yang memburuk, banyak perusahaan yang tidak berkembang, mengalami penurunan usaha, atau bahkan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu kesempatan yang tersedia di pasar semakin kecil. Akibat bagi pencari kerja adalah mereka mengalami persaingan yang lebih ketat dalam memperebutkan kesempatan kerja yang

relatif kecil. Mereka yang tidak dapat memenangkan persaingan ini akan menjadi pengangguran.

Dari hasil analisis statistik secara statistik diperoleh nilai $t_{\text{cari}} = 0,611$ dengan nilai signifikansinya = 0,554 yang lebih besar dari alfa pada tingkat kepercayaan 90 persen artinya pengangguran (U) tidak berpengaruh secara nyata (non significant) terhadap penawaran tenaga kerja (STK) di Provinsi Aceh.

3. Permintaan Tenaga Kerja (DTK)

Permintaan tenaga kerja dalam penelitian ini dipengaruhi oleh Upah Minimum Provinsi (UMP), Jumlah Industri (JI) dan Investasi (I). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ekonomi semua variabel penjelas yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja (DTK) yang dinilai dari tanda (sign) dan besaran (size) sudah sesuai dengan hipotesis. Namun secara statistik yang dilihat dari R^2 , Fhitung, dan Thitung terlihat bahwa untuk hasil pengujian

koefisien determinasi (R^2), diperoleh nilai sebesar 0,459. Nilai ini menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara variabel penjelas dengan variabel endogen (DTK) di Provinsi Aceh selama 15 tahun terakhir, dimana 45,9 persen mampu dijelaskan oleh variabel penjelas dalam fungsi persamaan ini, sedangkan selisihnya sebesar 54,1 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar dari fungsi persamaan ini.

Hasil pengujian secara serempak (uji-F) antara variabel endogen dengan variabel penjelas diperoleh nilai $F_{\text{cari}} = 3,113$ dari koefisien alfa yang ada ($\alpha = 0,071$) lebih kecil dari alfa pada tingkat kepercayaan 90 persen ($\alpha = 0,10$) artinya upah minimum provinsi (UMP), jumlah industri (JI) dan investasi (I) berpengaruh secara nyata (significant) terhadap permintaan tenaga kerja (DTK) di Provinsi Aceh. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada hasil analisis regresi berikut ini.

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi 2SLS Faktor yang Berpengaruh Terhadap Permintaan Tenaga Kerja(DTK) di Provinsi Aceh

Persamaan 1	Unstandardized Coefficients	t_{cari}	Sig.
	B		
Constant	1226907,587	2,937	0,014
UMP	0,445	0,393	0,702
JI	- 135,056	- 0,057	0,956
I	23,993	0,429	0,676
$F_{\text{cari}} = 3,113$			
Sig. = 0,071			
$R^2 = 0,459$			

Sumber: Data Diolah (2014).

Dari Tabel 6 dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{DTK} = 1226907,587 + 0,445 \text{ UMP} - 135,056 \text{ JI} + 23,993 \text{ I}$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa nilai konstanta pada persamaan permintaan tenaga kerja di Provinsi Aceh sebesar 1.226.907,587. Ini artinya

apabila upah minimum provinsi, jumlah industri dan investasi pada tahun tertentu dianggap konstan, maka akan meningkatkan permintaan tenaga kerja di Provinsi Aceh sebesar 1.226.907,587 jiwa pertahun.

Jika ditinjau dari hasil pengujian secara parsial hubungan antara variabel endogen: permintaan

tenaga kerja dengan variabel penjelas: upah minimum provinsi, jumlah industri dan investasi dengan tingkat kepercayaan 90 persen diperoleh hasil sebagai berikut.

a. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Nilai koefisien upah minimum provinsi (UMP) adalah sebesar 0,445. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan upah minimum provinsi 1 rupiah, akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebesar 0,445 jiwa dengan asumsi bahwa variabel lain di anggap konstan.

Kondisi ini bertolak belakang dengan teori yang menyatakan bahwa apabila terjadi peningkatan upah maka akan menurunkan jumlah permintaan tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan permintaan tenaga kerja di Provinsi Aceh lebih fokus pada kebutuhan tenaga kerja dibandingkan upah, dimana apabila terjadi peningkatan upah, sedangkan tenaga kerja sangat dibutuhkan, maka perusahaan tetap akan merekrut tenaga kerja yang diperlukan.

Dari hasil analisis statistik secara parsial diperoleh nilai $t_{\text{cari}} = 0,393$ dengan nilai signifikansinya = 0,702, lebih besar dari alfa pada tingkat kepercayaan 90 persen, artinya upah minimum provinsi (UMP) tidak berpengaruh secara nyata (non significant) terhadap permintaan tenaga kerja (DTK) di Provinsi Aceh.

b. Jumlah Industri (JI)

Nilai koefisien jumlah industri (JI) adalah sebesar -135,056. Ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan jumlah industri 1 unit industri, akan menurunkan permintaan tenaga kerja sebesar -135 jiwa pertahun dengan asumsi bahwa variabel lain di anggap konstan.

Dari hasil analisis statistik secara parsial diperoleh nilai $t_{\text{cari}} = -0,057$ dengan nilai signifikansi = 0,956

lebih besar dari nilai alfa pada tingkat kepercayaan 90 persen, artinya jumlah industri (JI) tidak berpengaruh secara nyata (non significant) terhadap permintaan tenaga kerja (DTK) di Provinsi Aceh.

c. Investasi (I)

Nilai koefisien investasi (I) adalah sebesar 23,993. Ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan investasi 1 milyar akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebesar 23,993 jiwa pertahun dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

Untuk mengembangkan sektor industri perlu adanya investasi yang memadai agar pengembangan sektor industri dapat berjalan sesuai tujuan. Usaha akumulasi modal dapat dilakukan dengan melalui kegiatan investasi yang akan menggerakkan perekonomian, dimana akan meningkatkan usaha produksi dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan permintaan tenaga kerja. (Sudarsono, 1998).

Dari hasil analisis statistik secara parsial diperoleh nilai $t_{\text{cari}} = 0,429$ dengan nilai signifikansinya = 0,676 lebih besar dari nilai alfa pada tingkat kepercayaan 90 persen artinya investasi (I) tidak berpengaruh secara nyata (non significant) terhadap permintaan tenaga kerja (DTK) di Provinsi Aceh.

KESIMPULAN

1. Secara ekonomi, hasil regresi menunjukkan bahwa masing-masing variabel-variabel yang mempengaruhi inflasi, upah minimum provinsi, penawaran dan permintaan tenaga kerja di Provinsi Aceh belum semua sesuai dengan tanda (*sign*) dan besaran (*size*) koefisien yang diharapkan.

2. Upah minimum provinsi berdampak pada peningkatan inflasi (INF) dan penawaran tenaga kerja (STK), dan berdampak pada penurunan permintaan tenaga kerja (DTK) di Provinsi Aceh.
3. Secara statistik, untuk hasil pengujian parsial (uji-t) masing-masing persamaan menunjukkan bahwa hanya variabel jumlah penduduk (JP) yang berpengaruh secara nyata (*significant*) terhadap penawaran tenaga kerja (STK), sedangkan variabel-variabel lain tidak berpengaruh secara nyata (*non significant*) terhadap variabel endogennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2008. Indikator Kesejahteraan Rakyat. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- Bakir, Z dan C. Manning. 2000. Angkatan Kerja Indonesia. Jakarta Rajawali. Jakarta.
- Bellante, D. dan M. Jackson. 1990. Ekonomi Ketenagakerjaan. Terjemahan Lembaga Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Boediono. 1985. Pengendalian Inflasi. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Edisi September. Jakarta.
- Djojohadikusumo, S. 1993. Pembangunan Ekonomi Indonesia. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Nopirin. 1999. Ekonomi Moneter. BPFE UGM. Yogyakarta
- Safrida. 2008. Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja dan Perekonomian Indonesia. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana., Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Septiani, R.D. 2010. Ketenagakerjaan. Tugas Mk. Ekonomi Sumberdaya Manusia. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.
- Simajuntak, P. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sudarsono. 1998. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Karunika Jakarta Universitas Terbuka. Jakarta.
- Soekirno, S. 1999. Pengantar Ekonomi Makro. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suparmoko, 1994. Pengantar Ekonomika Makro. BPFE. Yogyakarta.
- Tjiptoherijanto, P. 1996. Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.